



NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022



**NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan akan mampu memberikan akselerasi bagi terwujudnya hakikat pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, APBD juga merupakan salah satu wujud

dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara terminologi APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan anggaran daerah tahun anggaran 2022, masih dibayangi situasi pandemi Covid-19 dan diperkirakan masih akan memberikan dampak bagi perekonomian daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Tahun 2022 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk memantapkan berbagai kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi. Langkah-langkah kebijakan telah dilakukan Pemerintah untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Dukungan stimulus yang masif dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan ekonomi.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. Selain berpedoman pada dokumen tersebut diatas, penyusunan APBD juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun yang memberikan arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan

kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi termasuk dinamika yang berkembang di tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2022. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan RKP tahun 2022 berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi yang bersangkutan. Untuk RKP Tahun 2022 mengusung tema “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” dengan fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah, mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 serta dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan nasional pemerintah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung program nasional, tema pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing; dan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota

dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dan provinsi tersebut, tema pembangunan daerah Kota Magelang pada Tahun 2022 adalah "**Pulih Bersama untuk maju, sehat dan bahagia**". Tema pembangunan tersebut telah diselaraskan dan mendukung tema RKP Nasional maupun Provinsi dalam upaya menuju Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia. Prioritas pembangunan daerah Kota Magelang berpedoman pada tema pembangunan tahun 2022 dalam rangka pencapaian Visi Walikota yaitu:

1. Jaminan sosial yang berkeadilan untuk pemulihan ekonomi;
2. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang inklusif;
3. Pembangunan infrastruktur dan tata kawasan kota yang pro lingkungan berkelanjutan;
4. Penguatan kondusivitas kota;
5. Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city;
6. Penguatan daya Tarik kota untuk investasi dan pertumbuhan peluang usaha masyarakat;
7. Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM/tenaga kerja;
8. Pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas RT/RW untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan ketahanan sosial ekonomi warga;
9. Pengembangan Jaringan Kerjasama Antar Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Non Pemerintah untuk membangkitkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; dan
10. Peningkatan ketahanan daerah.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2022 ditujukan untuk Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi local dengan prioritas pada:

1. Peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan didukung penerapan TIK;
2. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan daya saing dengan perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
6. Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Nota Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran kondisi umum keuangan serta memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 yang merupakan sumber data dan informasi baik dari Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah maupun Anggaran Pembiayaan Daerah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai dasar rencana tahunan keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD serta dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Nota Keuangan APBD Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
- III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
- IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
- V. Program dan Kegiatan
- VI. Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan baik yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Sehingga posisi pendapatan daerah menjadi komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD guna meningkatkan kapasitas fiskal dalam pemberian pelayanan kepada publik. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas daerah yang lebih luas karena diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat.

Kewenangan kepala daerah tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri, maka pemerintah daerah dituntut harus kreatif agar pengelolaan di daerahnya dapat lebih fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Akan tetapi kalau dilihat dari struktur pendapatan, alokasi pendapatan dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi besar dibandingkan dengan pendapatan daerah daripada PAD. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja gaji pegawai. Dari kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan penerimaan, khususnya pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Untuk itu perlu

upaya guna mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan daerah yang ada.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan, sehingga dimungkinkan pendapatan tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi pada sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mempersiapkan kebijakan fiskal untuk tahun 2022 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2022 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan termasuk juga kebijakan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan struktur pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pendapatan Transfer Antar daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Penentuan target pendapatan, Pemerintah Kota Magelang tetap memperhatikan faktor-faktor *non-distorsi* terhadap perekonomian, yaitu hal-hal yang ditimbulkan adanya implikasi pajak atau pungutan yang bisa menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap perekonomian. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah guna mendukung kemandirian daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut harus digali semaksimal mungkin dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Secara umum permasalahan utama pendapatan daerah Kota Magelang adalah:

1. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah masih rendah.
2. Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (*ability to pay* rendah).
3. Belum optimalnya sistem pendataan/pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran/penagihan, dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak (*administration tax*) dan wajib retribusi.
4. Implementasi pemasangan alat monitoring transaksi dan panisme untuk terhadap wajib pajak belum optimal.

5. Database wajib pajak daerah yang belum terintegrasi dengan pihak terkait seperti DPMPTSP dan KPP.
6. Belum dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Mempertimbangkan kondisi perekonomian di Kota Magelang, dengan asumsi pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan beberapa kebijakan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	217.234.020.000
	1. Pajak daerah	33.979.000.000
	2. Retribusi Daerah	5.364.708.000
	3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.050.995.000
	4. Lain - lain PAD yang Sah	170.839.317.000
2	Pendapatan Transfer	614.924.617.000
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	557.847.417.000
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.077.200.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.603.690.000
	1. Pendapan Hibah	-
	2. Dana Darurat	-
	3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.603.690.000
	Jumlah	849.762.327.000

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.849.762.327.000,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp.217.234.020.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.614.924.617.000,00 dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.17.603.690.000,00.

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan mengacu pada regulasi yang ada dan secara rasional memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Penentuan target pendapatan, Pemerintah Kota Magelang tetap memperhatikan faktor-faktor *non-distorsi* terhadap perekonomian, yaitu hal-hal yang ditimbulkan adanya implikasi pajak atau pungutan yang bisa menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap perekonomian. Selain dana transfer dari pusat, pajak daerah merupakan pendapatan yang menjadi andalan penerimaan pemerintah Kota Magelang. Dalam konteks ini fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) fungsi. Pertama, fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kedua, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan.

Dengan pertimbangan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam pencapaian target pendapatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022 dengan melakukan kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
4. optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi
5. penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
6. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
7. peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);

8. perubahan regulasi yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
9. koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah; dan
10. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Pada prinsipnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Setiap dana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada output atau hasil yang terukur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran yaitu: yang pertama prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, yang kedua prinsip *prioritas* bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, dan yang ketiga prinsip *efisiensi* dan *efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi di digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Keterbatasan ruang fiskal membuat pembiayaan pembangunan di Kota Magelang masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja yang dialokasikan untuk belanja wajib. Oleh karena itu masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dari waktu ke waktu permasalahan utama Belanja Daerah Kota Magelang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang muncul setelah penetapan APBD.
2. Penyerapan anggaran yang belum optimal di awal tahun, masih menumpuk pada akhir tahun.
3. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah, untuk semua unsur perangkat daerah terkait dengan regulasi baru tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

4. Belum ada update Analisa Standar Belanja (ASB) terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baru dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien yang berdasarkan prestasi kerja, maka kebijakan belanja daerah di Kota Magelang tahun 2022 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah dampak pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya;
2. Mengutamakan anggaran belanja untuk program prioritas dan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah;
6. Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan;
7. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya;
8. Mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan beberapa kebijakan diatas, Pemerintah Kota Magelang merencanakan Belanja Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2022
1	Belanja Operasi	774.755.525.784
	1. Belanja Pegawai	386.060.728.292
	2. Belanja Barang dan Jasa	378.857.041.492
	3. Belanja Bunga	-
	4. Belanja Subsidi	-
	5. Belanja Hibah	8.327.756.000
	6. Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000
2	Belanja Modal	106.498.851.880
	1. Belanja Modal Tanah	-
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.498.949.000
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.966.109.928
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.057.442.952
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.976.350.000
	6. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
3	Belanja Tidak Terduga	32.405.718.393
	1. Belanja Tidak Terduga	32.405.718.393
4	Belanja Transfer	-
	1. Belanja Bagi Hasil	-
	2. Belanja Bantuan Keuangan	-
	Jumlah	913.660.096.057

Anggaran Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.913.660.096.057,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.774.755.525.784,00, belanja modal sebesar Rp.106.498.851.880,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp.32.405.718.393,00.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 harus berpedoman pada Kebijakan Umum APBD, serta harus memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja daerah Tahun 2022 secara rinci dirumuskan sebagaimana tertuang dalam lampiran I:

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Apabila APBD diperkirakan surplus diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Sementara itu, jika APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Namun apabila dalam penyusunan APBD terdapat Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan, maka Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pemberian yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
6. Penerimaan Pemberian Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran Pemberian merupakan transaksi keuangan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Adapun kebijakan pengeluaran pemberian antara lain mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Daerah.
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Pengeluaran Pemberian Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.2. Permasalahan Utama Pemberian

Permasalahan utama berkaitan dengan pemberian yaitu belum mantapnya ketahanan fiskal daerah, yang berakibat pada aspek pemberian daerah khususnya tersedianya sumber-sumber pemberian daerah untuk memenuhi kebutuhan pemberian daerah termasuk menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum yang ditetapkan dalam menyertai pembiayaan daerah yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan ini, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2022 ialah adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk mengetahui Rencana Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2022
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	73.397.769.057
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	73.377.769.057
	2. Pencairan Dana Cadangan	-
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
	4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000
	6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.500.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	
	2. Penyertaan Modal Daerah	9.500.000.000
	3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
	4. Pemberian Pinjaman Daerah	-
	5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	<i>Pembiayaan Netto</i>	63.897.769.057

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022, dari sisi penerimaan pembiayaan diperkirakan atau diasumsikan sebesar Rp.73.397.769.057,00, dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan terdapat pengeluaran Penyertaan Modal (investasi) sebesar Rp.9.500.000.000,00. Berdasarkan kebutuhan pembiayaan daerah dihadapkan dengan kemampuan sumber pembiayaan daerah dalam Tahun Anggaran 2022, maka Pembiayaan Netto sebesar Rp.63.897.769.057,00.

Pembiayaan Netto sebesar tersebut diatas digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2022, sehingga tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau sebesar Rp. 0,- (nol).

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas, maka belanja daerah direncanakan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam lampiran II:

BAB VI

PENUTUP

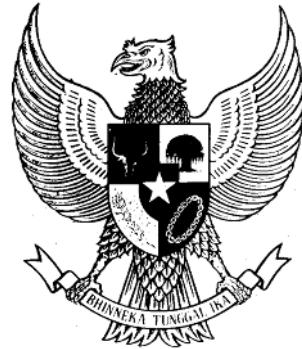
Demikian gambaran ringkas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang merupakan salah satu bentuk sarana dalam rangka penganggaran pembangunan daerah Kota Magelang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan program kerja Kota Magelang adalah tanggung jawab kita bersama. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayat serta inayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Magelang, September 2021

WALIKOTA MAGELANG

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD



LAMPIRAN I

NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD

KOTA MAGELANG

LAMPIRAN I

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	529.876.110.360
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	174.286.922.234
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	174.286.922.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.119.532.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.374.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.406.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.223.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.436.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.520.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.628.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.897.236.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.795.972.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.778.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.425.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.613.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	47.961.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.290.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.750.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.300.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.696.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.383.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.203.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.625.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	305.800.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	278.705.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.120.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.154.927.634
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19.438.768.544
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	91.500.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	174.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	200.000.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	417.508.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.105.516.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	356.445.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	458.309.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	441.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	274.411.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	288.135.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.558.100.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.827.054.360

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	50.000.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	848.628.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.961.007.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	487.790.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39.990.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	628.433.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.336.519.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	379.097.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.045.590.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.363.113.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	268.426.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	165.901.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.787.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	525.991.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	260.164.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60.597.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	125.930.000
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	12.462.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	12.462.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	12.462.000
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	290.478.067.450
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	290.478.067.450
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.802.068.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.827.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.449.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.008.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.058.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.694.109.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.651.257.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.061.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiyan	2.916.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.809.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.739.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.492.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.560.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	204.951.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.494.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.560.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.334.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.285.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	52.465.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	296.105.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.715.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.000.000
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	163.399.567.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	1 2.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	163.399.567.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.389.240.450
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.338.412.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	212.353.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.600.949.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.986.376.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.223.536.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	145.198.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	170.000.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.017.477.950
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.578.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	424.302.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.073.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.703.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50.000.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	68.838.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.840.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.202.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.588.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.560.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	323.613.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.607.391.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.072.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	343.333.950
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	34.075.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.687.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.590.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.452.954.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.044.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.885.229.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	49.898.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.028.636.000
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	656.345.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	38.410.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	452.986.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	33.792.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	111.738.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2.335.500
1 2 1.02.0.00.00.02.0000	2 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2.335.500
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.015.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	31.015.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	245.617.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UPTD	48.977.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	28.607.500
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.369.500
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.640.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.640.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	214.528.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	11.174.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	2.234.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	8.940.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produksi	13.164.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produksi	13.164.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	6.882.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	6.882.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	13.715.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	13.715.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	169.593.000
1 02 1.02.0.00.00.02.0000	04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar	169.593.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	826.614.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tin	809.601.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	809.601.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingka	13.935.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	13.935.000
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.797.296.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.797.296.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.497.690.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.056.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.870.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.975.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.066.611.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.903.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.257.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.476.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.058.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	25.300.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.544.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.995.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.609.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	134.737.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	163.863.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100.000.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.715.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Lu	395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000.000
1 3 1.03.0.00.0.00.03.0000 4 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.644.871.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.644.871.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik d	76.397.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah D	66.157.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah D	97.349.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	31.660.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	673.308.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	700.000.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	251.661.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dan Laut	251.661.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 6 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	251.661.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.821.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.821.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 07 2.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.821.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	346.991.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran dalam Perencanaan dan Pengembangan	346.991.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran dalam Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	328.683.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	18.308.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	260.112.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	260.112.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	172.134.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	26.683.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 09 2.01 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	61.295.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.509.174.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.509.174.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan dan Pengembangan	150.000.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	456.671.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.950.000.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	930.213.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	22.290.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	351.161.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.354.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	50.354.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	61.012.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	13.706.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	13.218.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	19.897.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	14.191.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	47.105.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	12.268.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	34.837.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	192.690.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	14.379.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	178.311.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	532.732.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	163.940.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	163.940.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	368.792.000
1 03 1.03.0.00.00.03.0000 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	161.661.000
1 3 1.03.0.00.00.03.0000 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	207.131.000
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.186.722.630
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.186.722.630
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.044.803.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.649.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.149.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.835.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.235.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.097.631.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.058.418.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20.227.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.329.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.652.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86.652.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.401.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.940.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	19.022.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.450.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.823.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.197.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	70.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	129.900.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	4.995.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.707.500
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.813.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupa	70.970.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	70.970.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	93.275.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupa	93.275.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	152.887.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.131.909.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	48.688.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permuk	48.688.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	79.760.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.003.461.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemug	257.994.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukim	141.527.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya P	1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.756.406.880
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	5 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.756.406.880
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	5 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Huni	4.329.975.380
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000	05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pe	340.933.500
2 11 2.11.0.00.00.08.0000		Dinas Lingkungan Hidup	0
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KERTIBITAN UMUM SERTA PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN	17.166.248.046
1 5 1.05.0.00.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	12.023.997.422
1 05 1.05.0.00.00.05.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.031.761.200
1 05 1.05.0.00.00.05.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.678.200
1 05 1.05.0.00.00.05.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.757.000
1 05 1.05.0.00.00.05.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.132.000
1 05 1.05.0.00.00.05.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.132.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	383.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	383.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.891.200
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.030.049.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.027.615.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.434.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.345.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.716.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.374.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.355.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	3.470.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.350.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.199.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.851.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.348.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.490.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	74.154.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	227.901.000
1 5 1.05.00.00.00.05.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.435.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.390.845.972
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten,	3.204.064.972
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Di	1.659.078.972
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perka	548.730.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	871.133.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat te	115.968.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	9.155.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	186.781.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wa	8.011.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	178.770.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAM	1.601.390.250
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya da	1.219.471.250
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.219.471.250
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	381.919.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialis	58.569.000
1 05 1.05.00.00.00.05.0000	04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Saran	323.350.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.142.250.624
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.324.166.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.008.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.458.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.342.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.342.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	383.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	383.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.019.349.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.546.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	803.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.461.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.745.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.238.000
1 5 1.05.00.00.00.23.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.358.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.800.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.040.000
1 05 1.05.00.00.00.23.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.501.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
1 5 1.05.0.00.0.00.23.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
1 5 1.05.0.00.0.00.23.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.847.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	92.642.000
1 5 1.05.0.00.0.00.23.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.205.000
1 5 1.05.0.00.0.00.23.0000	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	818.084.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis B)	19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	602.518.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	49.850.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabu	315.151.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	122.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195.665.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000	03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.550.000
1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.960.854.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	7.960.854.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.462.364.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.161.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.459.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	980.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.441.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	993.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.012.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.925.346.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.109.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.987.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.150.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.201.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	4.748.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.667.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.400.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.603.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.040.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	72.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	33.140.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
1 6 1.06.0.00.0.00.06.0000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22.395.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupa	61.154.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000	02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewe	46.960.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.032.820.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	2.752.821.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.01 01	Penyediaan Permakanan	2.010.293.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	26.586.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	97.334.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	618.608.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV	279.999.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.02 02	Pemberian Layanan Kedauratan	110.313.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.02 03	Penyediaan Permakanan	26.815.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.946.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	61.832.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 4 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	60.093.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	171.130.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 5 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	27.035.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 5 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	27.035.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.095.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31.503.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	112.592.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	61.934.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	20.432.000
1 6 1.06.00.00.00.06.0000 6 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	20.432.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	41.502.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.502.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	102.097.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	102.097.000
1 06 1.06.00.00.00.06.0000 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	102.097.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.437.011.794
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.704.730.700
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	Dinas Tenaga Kerja	8.704.730.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.650.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.553.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.574.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.124.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.153.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.285.500
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.159.946.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.051.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.496.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	13.228.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.778.300
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.874.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.876.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	99.655.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	34.712.500
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.254.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	766.644.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	762.260.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klas	762.260.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4.384.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.056.148.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.035.366.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	6.009.750
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	35.544.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	36.504.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	2.957.309.150
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.782.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	4.475.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	16.307.000
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	114.287.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Baik	114.287.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Baik	82.835.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Baik	8.215.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	23.237.500
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	1.887.683.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1.887.683.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.048.148.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	41.737.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.855.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	55.077.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.077.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	951.334.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	840.049.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	111.285.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 04	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	383.443.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.547.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	49.547.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kesejahteraan	154.350.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	154.350.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.546.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	179.546.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	125.520.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.520.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	101.145.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.375.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	121.681.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.531.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.531.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	94.150.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	94.150.000
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.013.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	1.013.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	914.467.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	164.322.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	94.146.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	47.598.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan	501.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	501.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90.994.000
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	351.832.000
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	351.832.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	293.318.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	293.318.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	90.049.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.739.458.875
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup	29.739.458.875
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.668.995.375
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.431.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.423.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.921.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.854.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.361.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.888.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.984.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.603.720.375
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.562.053.375
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.332.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.458.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.877.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.335.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.335.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.473.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.652.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.830.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.101.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	10.952.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.150.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.608.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.803.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.180.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.900.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.723.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.253.233.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	220.295.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi	962.475.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.100.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.788.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.575.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	97.695.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	97.695.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	97.695.000
2 11 2.11.0.00.00.00.08.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	353.583.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	292.324.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksana	239.626.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adap	2.698.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	61.259.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masa	61.259.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.054.236.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.054.236.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 4 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	1.761.405.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 4 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.292.831.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERP	6.231.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	6.231.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyim	6.231.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLIND	95.154.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	95.154.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	42.989.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan	52.165.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	222.709.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke	222.709.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	73.572.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	149.137.500
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	477.579.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477.579.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi d	477.579.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.773.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu	6.773.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	6.773.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.756.502.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01	Pengelolaan Sampah	11.724.250.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Ken	1.300.991.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	7.007.014.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	377.245.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4.000.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.035.000.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	32.252.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	1.457.000
2 11 2.11.0.0.0.0.08.0000 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	30.795.000
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	5.678.838.960
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.678.838.960
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.736.960
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.532.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.464.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.145.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	651.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	378.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.013.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.881.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.984.609.960
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.959.282.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.284.960
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.043.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.444.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	114.444.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.881.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.257.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.305.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.400.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	9.954.000
2 12 2.12.0.0.0.0.09.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.965.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.248.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 1	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.691.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.700.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 1	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.857.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.022.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	21.836.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	12.406.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 1	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.780.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	358.654.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000	2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	358.654.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 02	2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	155.851.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 02	2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	42.547.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 02	2.01 07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	160.256.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.672.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000	3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	89.672.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 03	2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	89.672.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	27.776.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14.980.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 04	2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4.535.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 04	2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.445.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.796.000
2 12 2.12.0.00.00.09.0000 04	2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.796.000
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.192.504.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	7.192.504.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.592.478.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.960.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.094.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.672.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.700.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.585.607.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.582.081.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiyan	6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.941.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.06 01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.167.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.726.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	76.720.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	114.870.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.665.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.210.455.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 3 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	306.678.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Le	306.678.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata	43.392.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, P	220.760.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	42.526.000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.154.007.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	2.154.007.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	197.392.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	6.955.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	6.955.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	190.437.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	171.219.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.897.613.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	263.046.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	118.950.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.096.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pela	1.404.743.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB k	67.193.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	823.779.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	513.771.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabup	148.224.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	148.224.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	59.002.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupate	59.002.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan P	59.002.000
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.713.353.489
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup	0
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000	Dinas Perhubungan	16.713.353.489
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.726.273.620
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.806.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.022.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.521.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.920.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.019.582.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.975.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.937.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.118.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.741.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.050.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.850.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.636.604
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.012.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.924.604
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.390.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	58.025.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	89.045.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bern	3.000.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.820.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lai	5.000.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.987.079.869
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	38.748.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	38.748.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.554.878.104
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.485.154.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	398.482.604
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.671.241.500
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	308.583.316
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	297.204.316
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	11.379.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	59.847.992
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas P	28.885.992
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	30.962.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	201.537.909
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.492.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4.464.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	112.816.909
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	64.854.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.911.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.411.939.548
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11.638.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Mana	467.433.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	49.856.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	880.601.548
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.411.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.07	Perseptujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	54.416.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 2 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	50.281.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4.135.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	13.042.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompe	13.042.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (16.311.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	16.311.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	314.951.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab	10.048.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) D	304.903.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.926.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Traye	5.926.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Pe	6.899.000
2 15 2.15.0.00.00.11.0000 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (6.899.000
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.664.811.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	11.664.811.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.207.619.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.676.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.584.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.767.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.681.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.988.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	509.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.251.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	14.360.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.680.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.823.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	137.704.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	33.814.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.305.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	208.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.559.138.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Li	4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.214.247.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	773.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	7.171.000
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.039.344.120
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.039.344.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	31.901.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	31.901.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kew	11.638.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabu	20.263.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keang	19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDN	116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	147.746.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Ko	147.746.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengu	147.746.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	627.602.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizina	627.602.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	410.916.120

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	48.113.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	43.122.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	95.330.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	95.330.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pe	95.330.000
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.743.835.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.743.835.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.623.104.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.906.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.318.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.315.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.697.962.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	430.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	398.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.088.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.796.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.741.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.122.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	69.914.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	45.039.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	500.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.13	Penataan Organisasi	3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	495.916.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	9.947.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.947.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	485.969.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	474.464.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	474.464.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	349.066.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	114.149.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Te	1.713.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	76.833.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.833.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.285.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	29.107.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.441.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.889.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	50.889.000
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Komputer	50.889.000
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.043.952.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	13.043.952.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.410.519.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.539.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.958.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.432.025.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.880.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	83.847.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.411.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.760.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.167.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.482.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.377.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	146.525.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	64.459.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.198.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	980.051.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	883.109.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pe	294.372.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kade	99.601.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan	13.155.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	425.430.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.602.210.650
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi K	2.348.542.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	2.348.542.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.487.104.600
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	610.494.100
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	876.610.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 3 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.170.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	137.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.033.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	51.171.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	51.171.000
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	645.752.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Se	602.693.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	43.059.000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	474.946.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	474.946.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	474.946.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	474.946.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik da	100.645.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	374.301.000
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.874.419.500
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.874.419.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.789.917.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	905.586.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	823.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6 2.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	315.098.000
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.236.564.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.236.564.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.668.202.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.642.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.435.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.935.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.033.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.230.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.386.473.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.02 01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.414.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.349.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.443.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 03	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 04	Penyedian Bahan Logistik Kantor	18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 07	Penyedian Bahan/Material	38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.730.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.08 01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.08 04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.914.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	82.040.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	79.980.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.564.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	568.362.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	466.527.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	23.648.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	231.912.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se	58.925.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.670.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	21.752.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat D	72.620.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.835.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta	60.500.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	41.335.000
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	277.044.000
2 23 2.23.2.24.0.0.15.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	187.860.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.273.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIK	5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	89.184.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di	815.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (se	815.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	88.369.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Ars	57.880.000
2 24 2.23.2.24.0.0.15.0000 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.489.000
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.919.323.610
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	704.683.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	572.815.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	382.112.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	135.370.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keci	246.742.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	131.868.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	64.415.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	64.415.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabup	67.453.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah K	67.453.000
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.096.808.000
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1.096.808.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	250.072.500
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	272.221.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pari	272.221.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar N	184.094.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebarluasan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar N	18.845.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	574.514.500
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ting	574.514.500
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	520.000.000
3 26 2.19.3.26.0.0.14.0000 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	54.514.500

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.357.706.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	8.357.706.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.706.109.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.852.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.504.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.348.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.087.353.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.071.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.251.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.963.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.648.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.509.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.747.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	90.989.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	71.758.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	722.605.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	46.809.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi da	46.809.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga	617.424.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	105.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pak	58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.05 02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	215.408.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	32.538.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B	14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	182.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	20.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	940.565.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Mer	40.002.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	40.002.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	31.696.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	26.737.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	4.959.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/k	313.065.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	519.088.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	26.430.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.04 03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	36.714.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	125.418.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	125.418.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12.604.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	112.814.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	618.455.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	618.455.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	63.321.000
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.306.096.722
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.449.129.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	639.759.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	38.637.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar K	38.637.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	38.637.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	715.928.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	715.928.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 5 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 5 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	94.429.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 6 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.971.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	23.454.029.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.454.029.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.631.158.296
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.050.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.241.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.806.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.052.206.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.269.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	50.026.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.180.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	17.357.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.000.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.919.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	129.850.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	353.757.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lai	40.312.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.754.667.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	10.754.667.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.802.300
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.081.315.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	496.168.792
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	68.204.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga	68.204.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data	68.204.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	69.697.473.900
4 1	SEKRETARIAT DAERAH	39.186.947.900
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000	Sekretariat Daerah	39.186.947.900
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.714.327.900
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.442.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.221.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.800.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.794.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.620.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.648.463.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.572.569.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	75.894.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.100.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.796.184.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.500.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.980.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.460.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	96.811.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.077.535.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.446.606.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.420.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.389.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	537.700.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	301.335.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	66.000.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.970.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.300.000
4 1 4.01.0.00.0.0.18.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	880.724.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.624.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88.100.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.0.18.0000 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	523.844.900
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	316.421.900
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	128.503.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	78.920.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	1 2.13	Penataan Organisasi	941.969.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	248.246.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	1 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	224.237.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.873.606.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	1 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	443.472.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	1 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.037.891.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	1 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.224.278.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.577.082.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	842.968.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahani	322.490.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	411.624.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.672.275.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.305.726.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	174.942.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	191.607.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	933.352.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	443.671.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	110.504.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	41.569.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	2 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.248.342.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	407.681.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	149.266.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	148.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	109.489.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	872.054.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	687.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	88.428.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	455.714.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	96.333.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	175.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	184.366.000
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	3 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	512.893.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	391.567.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000	03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	23.686.000
4 2		SEKRETARIAT DPRD	30.510.526.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.510.526.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.570.734.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.882.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.534.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.358.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000	1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.476.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.119.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.786.400.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000	1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	915.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	77.109.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.428.000

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1		2	3
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.428.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.974.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	317.160.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.505.943.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.483.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.842.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	94.710.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.064.121.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.763.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.07 05	Pengadaan Mebel	4.763.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.767.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.660.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.540.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	96.300.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	175.000.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.048.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESAJEHTERAAN DPRD	12.744.773.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.487.888.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	194.385.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	62.500.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	1 2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.698.264.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.461.425.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	132.000.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.939.792.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.563.847.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	184.349.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.286.084.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	93.414.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	98.421.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.200.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.02 03	Pembahasan APBD	13.746.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	13.773.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.599.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	396.846.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.0.19.0000	02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuang	9.118.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	96.932.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.117.750.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	1.509.953.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	181.632.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	249.761.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	169.682.000
4 2 4.02.0.00.0.0.19.0000	2 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	6.722.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	376.409.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000 2 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.505.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000 2 2.05 03	Pelaksanaan Reses	363.904.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	386.519.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	380.687.000
4 2 4.02.0.00.0.00.19.0000 2 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.832.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	82.018.489.393
5 1	PERENCANAAN	10.029.573.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.029.573.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.275.457.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.680.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.357.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.333.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	960.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.685.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.494.896.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.243.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.822.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.207.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.388.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	14.843.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.118.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.800.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.941.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	138.741.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	44.716.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.719.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	898.723.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	738.723.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 2 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.692.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	33.879.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000 2 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	75.137.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	614.015.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	126.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	117.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	26.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	855.393.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	259.532.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peran	21.880.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peran	80.562.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	157.090.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	350.872.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peran	54.100.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	207.282.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	89.490.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	244.989.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	162.644.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	82.345.000
5 2	KEUANGAN	47.432.555.393
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.432.555.393
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.142.739.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.502.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.603.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.689.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.470.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.569.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.868.592.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.799.481.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	55.814.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.606.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6.953.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.860.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.124.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.553.179.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	211.616.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	382.973.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.306.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	744.284.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	33.208.879.393
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	335.265.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 2 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	23.060.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	7.343.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tent	113.685.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala D	89.559.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	203.669.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.186.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 2 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	11.117.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dan	11.679.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	43.408.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP	106.940.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pe	21.339.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	264.227.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapat	34.963.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.571.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.190.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.226.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	36.167.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	7.643.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65.467.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	32.405.718.393
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 2 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	32.405.718.393
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.177.895.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.177.895.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.540.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	174.645.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	56.506.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	378.335.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	293.390.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60.107.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 3 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.903.042.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.903.042.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 4 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.159.643.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18.478.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	68.985.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Tanah	24.180.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 4 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	7.879.000
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	127.185.000
5 3	KEPEGAWAIAN	20.977.571.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	20.977.571.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.633.068.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.429.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.083.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.058.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.376.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.218.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.273.252.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.262.332.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.920.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.939.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.062.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	9.428.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.160.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.310.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.818.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.630.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	93.494.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi	38.405.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.400.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.331.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3.000.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.344.503.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.052.032.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	267.799.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.078.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	23.923.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	398.699.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	23.139.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	54.463.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	321.097.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	432.414.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	392.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	16.005.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	24.343.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	461.358.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	161.992.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	26.820.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	184.415.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.345.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	9.431.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	15.411.000
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.960.789.000
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.960.789.000
5 4 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	682.098.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Adm	682.098.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.278.691.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	2.278.691.000
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	618.001.000
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	618.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	618.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	147.774.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah	96.721.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	8.105.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Peraturan	42.948.000
5 5 5.01.5.05.0.00.20.0000 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	470.227.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	205.661.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi	119.872.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	81.914.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	62.780.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.058.982.000
6 1	INSPEKTORAT DAERAH	8.058.982.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat	8.058.982.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.530.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.952.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.279.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.504.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.483.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.620.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.005.506.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.655.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	3.881.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.422.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.649.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	9.052.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.724.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.195.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	66.425.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	76.770.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	159.961.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	141.288.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40.736.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8.116.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	4.901.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	18.866.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemer	68.669.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18.673.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.126.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 2 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	368.341.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.423.000
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	363.918.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	22.112.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN	63.677.225.000
7 1	KECAMATAN	63.677.225.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Magelang Selatan	21.440.556.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.272.443.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.602.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	758.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.668.622.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.980.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.468.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.116.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.840.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	23.629.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.020.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.558.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.720.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.613.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	115.080.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	165.191.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.335.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	62.103.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.649.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.613.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.956.277.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.606.440.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	108.688.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.228.282.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.246.387.000
7 1 7.01.0.00.0.00.25.0000 3 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengabdian	3.043.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Magelang Tengah	23.519.172.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.958.689.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.666.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.913.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.306.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.513.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.830.581.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.830.581.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.658.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.548.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.838.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	31.773.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.325.125.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.518.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.659.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	157.240.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi	127.588.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.059.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	66.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.229.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.442.965.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.861.555.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	103.256.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.456.792.000
7 1 7.01.0.00.0.00.26.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.301.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Terkait	1.045.459.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Magelang Utara	18.717.497.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.880.870.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.079.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.435.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.401.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.355.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.739.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.320.683.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	41.032.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.164.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.637.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.645.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.220.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	27.197.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.111.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.068.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Organisasi	180.634.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi	102.437.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	84.310.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	46.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.993.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.597.662.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.972.630.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	113.154.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.100.457.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.753.715.000
7 1 7.01.0.00.0.00.27.0000 3 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Terkait	89.379.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.975.480.000
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.975.480.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.975.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.338.953.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.283.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.703.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.750.126.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.123.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.222.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.385.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	25.540.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.120.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.160.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.301.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	150.485.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper	37.916.000
8 1 8.01.0.00.0.00.28.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	185.287.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	185.287.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	98.742.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa	84.530.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	2.015.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PEND	667.364.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Bud	667.364.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokr	88.240.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Poli	579.124.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	114.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawa	114.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media	80.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan O	34.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	319.153.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial c	319.153.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fas	34.787.000

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	68.387.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	154.434.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	61.545.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENCEGAHAN	350.133.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan Bencana	350.133.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Pengawas	19.995.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Pengawas	171.090.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	159.048.000
TOTAL		913.660.096.057



LAMPIRAN II

NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

KOTA MAGELANG

LAMPIRAN II

PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD
1 2 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 02 1.02.00.00.02.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1 2 1.02.00.00.02.0000 2 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1 02 1.02.00.00.02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 02 1.02.00.00.02.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
1 02 1.02.00.00.02.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
1 02 1.02.00.00.02.0000 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
1 02 1.02.00.00.02.0000 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.02.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
1 02 1.02.00.00.02.0000 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
1 02 1.02.00.00.02.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.00.00.00.02.0000 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3 1.03.00.00.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPahan REGIONAL
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1 3 1.03.00.00.00.03.0000 4 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan
1 03 1.03.00.00.00.03.0000 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 03 1.03.00.00.03.0000 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
1 03 1.03.00.00.03.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 1.03.00.00.03.0000 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 3 1.03.00.00.03.0000 6 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1 3 1.03.00.00.03.0000 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1 03 1.03.00.00.03.0000 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.03.0000 07 2.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 3 1.03.00.00.03.0000 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1 03 1.03.00.00.03.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
1 03 1.03.00.00.03.0000 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan
1 03 1.03.00.00.03.0000 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.03.0000 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1 03 1.03.00.00.03.0000 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
1 03 1.03.00.00.03.0000 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.03.0000 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan
1 03 1.03.00.00.03.0000 09 2.01 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan
1 3 1.03.00.00.03.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1 3 1.03.00.00.03.0000 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1 03 1.03.00.00.03.0000 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
1 03 1.03.00.00.03.0000 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk
1 3 1.03.00.00.03.0000 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1 3 1.03.00.00.03.0000 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1 3 1.03.00.00.03.0000 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1 03 1.03.00.00.03.0000 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 1.03.00.00.03.0000 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 1.03.00.00.03.0000 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1 03 1.03.00.00.03.0000 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
1 03 1.03.00.00.03.0000 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
1 03 1.03.00.00.03.0000 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1 03 1.03.00.00.03.0000 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
1 3 1.03.00.00.03.0000 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1.04.2.10.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 5 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1 4 1.04.2.10.00.04.0000 5 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1 04 1.04.2.10.00.04.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2 11 2.11.00.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1 5 1.05.00.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 1.05.00.00.05.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 5 1.05.00.00.05.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 05 1.05.00.00.05.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 05 1.05.00.00.05.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.00.00.05.0000 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
1 05 1.05.00.00.05.0000 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1 05 1.05.00.00.05.0000 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
1 05 1.05.00.00.05.0000 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1 05 1.05.00.00.05.0000 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 05 1.05.00.00.05.0000 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1 05 1.05.00.00.05.0000 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
1 5 1.05.00.00.23.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 1.05.00.00.23.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 5 1.05.00.00.23.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 05 1.05.00.00.23.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 5 1.05.00.00.23.0000 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1 05 1.05.00.00.23.0000 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 6 1.06.00.00.06.0000	Dinas Sosial
1 06 1.06.00.00.06.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 6 1.06.00.00.06.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1 06 1.06.00.00.06.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1 6 1.06.00.00.06.0000 2	PROGRAM PEMERINTAHAN SOSIAL
1 06 1.06.00.00.06.0000 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber
1 06 1.06.00.00.06.0000 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.00.00.06.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.00.00.06.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1 6 1.06.00.00.06.0000 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

KODE		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1		2
1 06 1.06.00.00.06.0000	04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.01 01	Penyediaan Permakanan
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1 06 1.06.00.00.06.0000	04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
1 06 1.06.00.00.06.0000	04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.02 03	Penyediaan Permakanan
1 06 1.06.00.00.06.0000	04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1 6 1.06.00.00.06.0000	4 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan
1 06 1.06.00.00.06.0000	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1 6 1.06.00.00.06.0000	5 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1 6 1.06.00.00.06.0000	5 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1 06 1.06.00.00.06.0000	05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1 06 1.06.00.00.06.0000	05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
1 06 1.06.00.00.06.0000	05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1 6 1.06.00.00.06.0000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1 06 1.06.00.00.06.0000	06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1 6 1.06.00.00.06.0000	6 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1 06 1.06.00.00.06.0000	06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1 06 1.06.00.00.06.0000	06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
1 06 1.06.00.00.06.0000	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1 06 1.06.00.00.06.0000	07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1 06 1.06.00.00.06.0000	07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000	1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000	03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.01 02	Pelayanan antar Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 4 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja
2 7 2.07.3.32.0.00.07.0000 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 8 2.13.2.08.2.14.10.0000 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di
2 8 2.13.2.08.2.14.10.0000 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 8 2.13.2.08.2.14.10.0000 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 4 1.04.2.10.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.0.00.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.0.00.00.08.0000 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 11 2.11.00.00.08.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
2 11 2.11.00.00.08.0000 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2 11 2.11.00.00.08.0000 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
2 11 2.11.00.00.08.0000 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2 11 2.11.00.00.08.0000 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2 11 2.11.00.00.08.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2 11 2.11.00.00.08.0000 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2 11 2.11.00.00.08.0000 4 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya
2 11 2.11.00.00.08.0000 4 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2 11 2.11.00.00.08.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2 11 2.11.00.00.08.0000 5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
2 11 2.11.00.00.08.0000 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2 11 2.11.00.00.08.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
2 11 2.11.00.00.08.0000 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
2 11 2.11.00.00.08.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2 11 2.11.00.00.08.0000 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
2 11 2.11.00.00.08.0000 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 2.11.00.00.08.0000 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 11 2.11.00.00.08.0000 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
2 11 2.11.00.00.08.0000 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan
2 11 2.11.00.00.08.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 2.11.00.00.08.0000 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.00.00.08.0000 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan
2 11 2.11.00.00.08.0000 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.00.00.08.0000 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 2.11.00.00.08.0000 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2 11 2.11.00.00.08.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01	Pengelolaan Sampah
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian
2 11 2.11.00.00.08.0000 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.00.00.09.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 2.12.00.00.09.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 12 2.12.00.00.09.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 12 2.12.00.00.09.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 12 2.12.00.00.09.0000 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2 12 2.12.00.00.09.0000 2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2 12 2.12.00.00.09.0000 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
2 12 2.12.00.00.09.0000 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
2 12 2.12.00.00.09.0000 02 2.01 07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan
2 12 2.12.00.00.09.0000 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.00.00.09.0000 3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2 12 2.12.00.00.09.0000 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
2 12 2.12.00.00.09.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2 12 2.12.00.00.09.0000 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2 12 2.12.00.00.09.0000 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data
2 12 2.12.00.00.09.0000 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data
2 12 2.12.00.00.09.0000 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.00.00.09.0000 04 2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 3 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000	Dinas Perhubungan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 2 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam
2 15 2.15.0.0.0.0.11.0000 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 1 2.13	Penataan Organisasi
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2 18 2.18.0.00.0.0.13.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 18 2.18.0.0.0.0.13.0000 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.0.0.0.13.0000 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2 19 2.19.3.26.0.0.14.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 2 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1 1 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6 2.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Karsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 2 2.05 02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 4 2.04 03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000	Sekretariat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4 1 4.01.0.00.0.00.18.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4 1 4.01.00.00.18.0000 1 2.13	Penataan Organisasi
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
4 1 4.01.00.00.18.0000 1 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4 01 4.01.00.00.18.0000 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4 1 4.01.00.00.18.0000 1 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan
4 1 4.01.00.00.18.0000 1 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4 1 4.01.00.00.18.0000 1 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4 01 4.01.00.00.18.0000 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4 01 4.01.00.00.18.0000 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4 01 4.01.00.00.18.0000 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4 01 4.01.00.00.18.0000 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4 01 4.01.00.00.18.0000 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah
4 1 4.01.00.00.18.0000 2 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4 01 4.01.00.00.18.0000 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4 1 4.01.00.00.18.0000 3 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4 01 4.01.00.00.18.0000 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4 2	SEKRETARIAT DPRD
4 2 4.02.00.00.19.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 4.02.00.00.19.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.07 05	Pengadaan Mebel
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4 2 4.02.00.00.19.0000 1 2.16	Layanan Administrasi DPRD
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4 02 4.02.00.00.19.0000 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4 02 4.02.00.00.19.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.02 03	Pembahasan APBD
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4 2 4.02.00.00.19.0000 2 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4 02 4.02.00.00.19.0000 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
4 2 4.02.0.0.0.0.19.0000 2 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4 2 4.02.0.0.0.0.19.0000 2 2.05 03	Pelaksanaan Reses
4 2 4.02.0.0.0.0.19.0000 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
4 02 4.02.0.0.0.0.19.0000 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
4 2 4.02.0.0.0.0.19.0000 2 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 1	PERENCANAAN
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 2 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas
5 1 5.01.5.05.0.0.20.0000 2 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5 01 5.01.5.05.0.0.20.0000 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah
5 2	KEUANGAN
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 2 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
5 2 5.02.0.00.0.00.21.0000 2 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 2 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 01	Penyusunan Standar Harga
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 3 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 4 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 4 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
5 2 5.02.0.0.0.021.0000 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 02 5.02.0.0.0.021.0000 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
5 3	KEPEGAWAIAN
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5 03 5.03.5.04.0.0022.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 3 5.03.5.04.0.0022.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 1 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 3 5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 4 5.03.5.04.0.00.22.0000 2 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 1 5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
5 5 5.01.5.05.0.00.20.0000 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 1	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6 1 6.01.0.00.0.00.24.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.09 05	Pemeliharaan Mebel
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 2 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6 1 6.01.00.00.00.24.0000 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6 01 6.01.00.00.00.24.0000 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7 1	KECAMATAN
7 1 7.01.00.00.00.25.0000	Kecamatan Magelang Selatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7 1 7.01.00.00.00.25.0000 3 2.02 04	Evaluasi Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.00.00.00.25.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
7 1 7.01.00.00.00.26.0000	Kecamatan Magelang Tengah
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
7 1 7.01.00.00.00.26.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.00.00.00.26.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
7 1 7.01.0.0.00.26.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 1 7.01.0.0.00.26.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 1 7.01.0.0.00.26.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.0.00.26.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
7 1 7.01.0.0.00.27.0000	Kecamatan Magelang Utara
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7 1 7.01.0.0.00.27.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.0.00.27.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 1 7.01.00.00.00.27.0000 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 1 7.01.00.00.00.27.0000 3 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7 1 7.01.00.00.00.27.0000 3 2.02 04	Evaluasi Kelurahan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.00.00.00.27.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 8.01.00.00.00.28.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8 1 8.01.00.00.00.28.0000 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.00.00.00.28.0000 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
1	2
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
TOTAL	